

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik yang terjadi pada peradaban umat manusia sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan manusia untuk dapat menerima perbedaan yang terjadi diantara umat manusia itu sendiri (UNESCO. *Guidelines for Inclusion : Ensuring access to Education for All* Tahun 2005). Perbedaan yang disebabkan oleh ras, fisik, etnik, kemampuan, tingkat hidup, cara pandang, bahkan agama menimbulkan rasa superior, kompetisi dan inferior diantara manusia yang akhirnya menjurus kepada terciptanya konflik dunia yang tiada berkesudahan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai badan dunia secara terus menerus merespon kondisi tersebut dengan mengemukakan suatu pemikiran dan usaha untuk menghindari konflik di masa depan dengan mengajarkan anak-anak yang ada di dunia melalui pendidikan formal tentang kebersamaan, harmoni, perilaku anti kekerasan dan menjadi pribadi social yang luhur. Hal tersebut didapat dengan cara belajar menerima dan menyukai orang lain, menghargai perbedaan dan melakukan kegiatan yang dilakukan bersama. Salah satu cara yang dilakukan oleh PBB untuk mewujudkan tercapainya dunia yang damai melalui sektor pendidikan tersebut adalah dengan menggerakkan negara di dunia untuk berkomitmen menyelenggarakan dan mendukung pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi berarti mengakomodasi dan menempatkan anak pada sekolah reguler tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak berbakat (*gifted children*), anak di daerah terpencil, pekerja anak dan anak jalanan, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (UNESCO Tahun 2005). Usaha ini secara berkala digaungkan PBB dengan berbagai macam kegiatan serta perjanjian antara lain *Declaration of Rights of Disabled Persons* (1975), *The Convention on The Rights of the Child* (1989), *The World Conference of Education for All* (1990), *The World Conference of Special Needs Education on Salamanca-Spain* (1994), dengan keyakinan bahwa: (1) setiap anak memiliki hak untuk mendapat pendidikan; (2) setiap anak mempunyai karakteristik, kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar yang unik dan berbeda; (3) perancangan sistem pendidikan dan implementasi program pendidikan harus dibuat dengan mengakomodasi berbagai macam karakteristik dan kebutuhan anak; (4) setiap anak berkebutuhan khusus harus mempunyai akses memasuki sekolah reguler dan sekolah tersebut harus menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, serta; (5) sekolah reguler dengan orientasi pendidikan inklusi adalah cara yang paling tepat dalam mencapai tujuan untuk memerangi sikap diskriminasi pada masyarakat, menciptakan komunitas masyarakat yang ramah dan dapat menerima perbedaan serta menyediakan pendidikan untuk semua (*The Salamanca Statement And Framework For Action On Special Needs Education*. Adopted By

The World Conference On Special Needs Education: Access And Quality Salamanca, Spain, 7-10 June 1994).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, merespon dan mendukung komitmen dunia terhadap pendidikan inklusi dengan mengeluarkan beberapa perangkat undang undang, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang kesamaan hak pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan maupun kondisi geografis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Selain dari pada itu, Permendiknas no. 70 tahun 2009 pasal 4 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif (Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam mengenyam pendidikan.

Berdasarkan hal di atas, pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi terbuka di setiap jenjang dan

satuan pendidikan. Sistem pendidikan inklusi memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersama sama belajar dengan anak-anak normal, sehingga adanya usaha atau proses penyesuaian diri anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan kehidupan sehari-hari secara lebih nyata.

Pelayanan pendidikan yang selama ini diterapkan dalam melayani pendidikan ABK disesuaikan pada derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Adapun SLB yang melayani anak dengan hambatan penglihatan ditampung pada SLB A / Tunanetra, SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran pada SLB B / Tunarungu, SLB bagi anak dengan hambatan berfikir/kecerdasan ditampung di SLB C / Tunagrahita, SLB yang disediakan untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik ditampung di SLB D / Tunadaksa, SLB yang dimanfaatkan untuk melayani anak dengan hambatan emosi dan perilaku di SLB E / Tunalaras, sedangkan SLB yang digunakan untuk menampung anak dengan hambatan majemuk adalah SLB G / Tunaganda.

Sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena sejak awal mereka diisolasikan dari teman sebayanya. Tembok ini pun tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel, sehingga mengakibatkan interaksi sosial kelompok difabel di masyarakat menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel,

sebaliknya kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif*, Jakarta. 2007).

Semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif*, Jakarta. 2007).

Sistem pendidikan inklusi memberi kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk bersama-sama belajar dengan anak-anak normal, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari secara lebih nyata.

Layanan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini dikembangkan sistem manajemen pendidikan terpadu (inklusi) yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan bagi anak berkebutuhan khusus. Pengembangan pendidikan terpadu

dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta tetap mengutamakan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan suatu manajemen sekolah terpadu (inklusi) yang baik.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah inklusif perlu didukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber daya, baik personal maupun sarana prasaran secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif*, Jakarta. 2007).

Tugas utama manajemen sekolah, memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi input siswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan kegiatan belajar mengajar (Direktorat Pendidikan Luar Biasa Depdiknas Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi, *Manajemen Pendidikan Inklusi*, Jakarta:, 2003),.

Jumlah sekolah yang diklasifikasikan sebagai sekolah inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan sumber data Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2014 bahwa jumlah sekolah inklusi di Kota Yogyakarta ada 57 sekolah (Surat Keputusan Kepala

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 Tanggal 12 Juni 2014). Satu di antaranya adalah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Yogyakarta (SMPM 9).

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Yogyakarta telah menyelenggarakan pendidikan terpadu yang memberi jawaban terhadap kesulitan belajar peserta didik dengan cara mengklasifikasikan para siswa menurut tingkat kebutuhan dan kesulitan dari masing-masing peserta didiknya.

SMPM 9 dengan konsisten menyelenggarakan Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Paling tidak, siswa yang terdaftar secara formal termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus (ABK) sekitar 9 siswa yang terdiri dari Cerdas Istimewa (Gangguan Perilaku), Autis Ringan, Tuna Grahita Ringan, *Slowleaner*, Kesulitan Belajar Berhitung, Tuna Rungu dan Cerdas Istimewa (Gangguan Emosi) (Wawancara dengan Guru ABK pada hari Selasa 14 November 2017 Pukul 12.30 – 13.30 di SMPM 9 Yogyakarta dan Data Deskripsi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 2017/2018).

Sembilan siswa yang memiliki kemampuan istimewa dan berkebutuhan khusus tersebut, belajar, berinteraksi dan bersosialisasi sehari-hari dengan guru, karyawan serta dengan peserta didik lain di sekolah tersebut. Pemandangan dan fenomena seperti inilah yang menjadi salah satu tujuan, adanya sekolah inklusi, yaitu tidak adanya sekat antara peserta didik yang normal dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Kurikulum Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Yogyakarta?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan manajemen kurikulum inklusi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Implementasi Manajemen Kurikulum Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Yogyakarta.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan manajemen kurikulum inklusi di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 9 Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini dalam skala praktis adalah memperoleh inspirasi, persepsi dan kreatifitas dalam menggali dan mengekspresikan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis melalui penulisan ilmiah, serta dapat memberikan dorongan motivasi untuk belajar lebih dalam maupun mendapatkan pengalaman yang intensif tentang sumber daya manusia. Selain dari pada itu, penelitian ini pun diusahakan akan memberikan masukan kepada dinas terkait, dalam penerapan kurikulum inklusi.

b. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan menerapkan hal tersebut pada kasus nyata yang terjadi di lapangan dalam bidang pelaksanaan pendidikan inklusi secara khusus dan manajemen kurikulum secara umum.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan dari fokus pembahasan, yaitu Implementasi Manajemen Kurikulum Inklusi.

BAB II akan dibahas tentang Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Hal ini akan berisi uraian tentang penelitian-penelitian terdahulu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Implementasi Manajemen Kurikulum Inklusi. Adapun kerangka teori akan berisi tentang konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III adalah Metode Penelitian. Pada bab ini, akan disajikan tentang metode penelitian yang digunakan, sesuai dengan masalah dan pendekatan penelitian. Adapun contohnya meliputi jenis pendekatan, populasi, sampel, lokasi, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas serta analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Adapun bab ini berisi tentang informasi dan tinjauan kritis mengenai gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum responden, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi manajemen kurikulum inklusi.

BAB V adalah bab terakhir, yaitu penutup. Bab ini akan menyajikan tentang kesimpulan secara ringkas tentang temuan-temuan dalam penelitian ini. Sajian yang kedua pada bab ini yaitu saran yang dirumuskan berdasarkan dengan hasil penelitian maupun saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian. Bagian terakhir dari bab ini adalah kata penutup yang menunjukkan bahwa pemaparan penelitian ini telah selesai.